



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,  
Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 12/HM.00/IV/2021**

**Komnas HAM RI Sangat Khawatir dengan Krisis Politik  
dan Kemanusiaan di Myanmar**

Komnas HAM RI melihat perkembangan yang terjadi di negara tetangga kawasan Asia Tenggara, Myanmar sebagai refleksi bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak politik dengan bijak serta menjunjung tinggi demokrasi dan prinsip hak asasi manusia.

Peristiwa kudeta militer Myanmar yang dipimpin Jendral Min Aung Hlaing mencuat ke tengah publik karena berhasil menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru saja terpilih pada 1 Februari 2021.

Kudeta tersebut mengakibatkan demonstrasi besar-besaran dari penduduk Myanmar hingga menimbulkan korban. Kegaduhan politik ini juga menyita perhatian dunia, hingga menimbulkan kecaman dari sejumlah negara.

Dilaporkan lebih dari 700 orang sipil terbunuh dalam aksi demonstrasi damai dan 46 anak-anak ikut menjadi korban. Aksi junta militer Myanmar ditengarai mengakibatkan ribuan orang luka-luka dan lebih dari 3.000 orang ditahan. Tindak kekerasan tersebut juga berpotensi menambah jumlah pengungsi dari Myanmar menuju negara-negara sekitarnya.

Pembatasan oleh junta militer juga mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Mereka membatasi pemberitaan dengan melakukan penahanan terhadap 71 jurnalis lokal. Lebih dari 25 orang juga dituduh menyebarkan berita bohong.

Keterbatasan komunikasi sangat dirasakan rakyat Myanmar karena pemerintah sejak 14 Februari 2021 membuka akses internet hanya delapan jam sehari. Berbagai kanal media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp*) pun ditutup aksesnya.

Komnas HAM RI menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait implikasi kudeta politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar terhadap situasi pelaksanaan prinsip HAM di ranah regional. Dalam pemantauan melalui pemberitaan global secara seksama, Komnas HAM RI mencermati menguatnya praktik otoritarianisme di kawasan Asia Tenggara. Indikasinya mengarah kepada semakin menyempitnya ruang untuk peduli pada isu-isu HAM dan demokrasi serta di sisi lain semakin maraknya praktik kekerasan dan diskriminasi. Situasi tersebut membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara rentan untuk diintervensi oleh kekuatan anti demokrasi dan HAM.

Untuk itulah, Komnas HAM RI berharap semua pihak menahan diri, menggelar dialog konstruktif, dan berusaha mencari penyelesaian positif dan damai. Kondisi damai tersebut demi menciptakan stabilitas politik, hukum, dan HAM yang menjadi indikator penting dalam mendukung aktivitas perekonomian di Myanmar maupun negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

Komnas HAM RI yang tergabung dalam organisasi internasional HAM, yakni *the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions* (APF) dan *the Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI) akan terus mendorong keamanan dan kestabilan di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara melalui sokongan kuat bagi peralihan demokrasi Myanmar serta penguatan kerja sama antar Lembaga negara di bidang hak asasi manusia (National Human Rights Institution) di kawasan Asia Tenggara (*the South East Asia National Human Rights Institutions Forum/SEANF*) untuk mencegah aksi intervensi serta otoritarianisme.

### **Rekomendasi bagi pemerintah Indonesia**

Menghadapi krisis kemanusiaan di Myanmar, Pemerintah Indonesia sebaiknya menjalankan prinsip-prinsip hubungan luar negeri yang selain berlandaskan ke Piagam ASEAN, juga bersandar kepada *ASEAN Human Rights Declaration* yang mengakui dan menghormati prinsip dan norma hak asasi manusia. Setiap negara ASEAN adalah bagian dari komunitas internasional dan karenanya juga harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak-hak kebebasan individu dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kekerasan, penyiksaan mau pun kesewenang-wenangan lainnya.

Sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki peran penting, pemerintah Indonesia mesti mengambil sikap yang tegas untuk tidak membiarkan praktik anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi berlangsung di kawasan ASEAN. Untuk itu perlu mengambil inisiatif terdepan bersama anggota ASEAN lainnya maupun komunitas internasional lainnya menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Langkah yang diambil dalam bentuk KTT Khusus yang akan diselenggarakan 24 April 2021 di Jakarta semestinya dimanfaatkan untuk mengingatkan pemerintah militer yang mengambil paksa kekuasaan di Myanmar untuk segera memulihkan situasi politik di negeri tersebut melalui jalan politik tanpa kekerasan. Juga perlu memastikan tidak ada lagi kekerasan, penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin politik maupun aktivis pro demokrasi-hak asasi manusia di Myanmar.

### **Rekomendasi bagi aksi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat**

Komnas HAM menyerukan agar otoritas setempat menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terutama Pasal 19 yang menunjukkan pengakuan atas kebebasan kebebasan berpendapat dan kebebasan akan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun sebagai salah satu standar dari hak asasi manusia yang diakui secara luas di forum internasional.

Tindakan kekerasan, pembunuhan, penculikan, penahanan terhadap tokoh-tokoh politik, aktivis demokrasi dan hak asasi manusia harus dihentikan serta diperlukan suatu investigasi yang jujur dan komprehensif atas kematian ratusan demonstran, ribuan orang terluka dan dipenjarakan oleh lembaga atau pihak yang independen dan dipercaya. Otoritas di Myanmar mesti memberikan ruang yang bebas kepada pihak yang melakukan

investigasi atas pelanggaran HAM sehingga diperoleh suatu laporan yang dipercaya oleh masyarakat baik nasional mau pun internasional.

### **Rekomendasi bagi jejaring HAM di kawasan Asia Tenggara**

Jejaring institusi HAM di Asia Tenggara harus memperkuat intervensi atas aksi-aksi kekerasan junta militer Myanmar melalui kanal-kanal media komunikasi supaya publik ikut merespons dan memberikan dukungan untuk menghentikan aksi tersebut.

### **Rekomendasi bagi penyelesaian krisis pengungsi Rohingya**

Peristiwa kedua terkait upaya penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Kekerasan bersenjata oleh pihak militer memakan ratusan korban jiwa warga minoritas Muslim Rohingya kembali terjadi di Rakhine State, Myanmar sejak 25 Agustus 2017.

Sekira 400 warga Rohingya dilaporkan tewas oleh aparat militer Myanmar dan puluhan ribu lainnya mengungsi ke berbagai wilayah untuk menyelamatkan diri di antaranya anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. PBB menegaskan tindakan militer Myanmar merupakan aksi pemberantasan etnis (genosida) yang melanggar kemanusiaan. Pada Desember 2017, terbit Resolusi PBB berisi seruan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya dan kelompok minoritas lain.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Komnas HAM memiliki tanggung jawab untuk ikut mengupayakan hal-hal penting untuk melindungi kehidupan orang-orang yang tidak bersalah dan terampas hak-haknya. Komnas HAM pun ikut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan krisis Rohingya ke Mahkamah Pidana Internasional.

**Jakarta, 22 April 2021**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI**

**Ahmad Taufan Damanik**

Ketua